

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum nasional berlandaskan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Nasional No.70a/SE/MPN-/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah. Dalam penerapannya integrasi PRB tidak dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang memuat materi yang terkait dengan PRB, antara lain mata pelajaran Agama, IPA, IPS, Sains, Bahasa Indonesia, Matematika, dan mata pelajaran yang lain. Prioritas pilihan integrasi PRB yang diberikan adalah sebagai berikut; (1) Mengintegrasikan PRB ke dalam mata pelajaran dari kurikulum yang berjalan, (2) Mengintegrasikan PRB ke dalam muatan lokal dari kurikulum yang berjalan, (3) Mengintegrasikan PRB ke dalam kegiatan ekstra kurikuler dari kurikulum yang berjalan, (4) Menyelenggarakan mata pelajaran yang telah terintegrasikan PRB untuk muatan lokal dibawah kurikulum baru berbasis PRB, (5) Membuat kegiatan ekstra kurikuler PRB di bawah kurikulum baru berbasis PRB. Adapun muatan PRB dalam kurikulum nasional maka sebagai berikut:

a. Pengintegrasian PRB dalam Mata Pelajaran

Dalam model ini, pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) terhadap mata pelajaran dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya; 1) Mengidentifikasi materi pembelajaran tentang PRB; 2) Menganalisis KD yang memungkinkan dapat diintegrasikan dengan PRB; 3) Menyusun silabus yang terintegrasi PRB; dan 4) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

b. Pengembangan Muatan Lokal PRB

Pengembangan mata pelajaran muatan lokal sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan komite sekolah, dengan melaksanakan langkah-langkah seperti; 1) Menganalisis konteks mata pelajaran muatan lokal dengan mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah, meninjau potensi daerah yang bersangkutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kekayaan alam, menentukan fungsi dan susunan atau kompetensi muatan lokal, menentukan bahan kajian muatan lokal, menentukan mata pelajaran muatan lokal, dan mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajarannya dengan mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh BNSP; 2) Penyusunan standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal PRB Gempa Bumi; dan 3) Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Pengurangan Resiko Bencana Gempa Bumi.

c. Pengintegrasian PRB dalam Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui aktifitas pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan ini melalui kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen, yaitu pelayanan konseling meliputi pengembangan kehidupan pribadi, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir. Sedangkan ekstrakurikuler, meliputi kegiatan kepramukaan, latihan kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja, seni, olahraga, cinta alam, jurnalistik, teater, dan keagamaan.

2. Temuan penelitian didapatkan di lapangan, yakni di MIN Jejeran, menunjukkan bahwa, integrasi pengurangan resiko Gempa Bumi dalam kurikulum pendidikan dapat diimplementasikan ke dalam beberapa mata pelajaran yang berjalan, termasuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu integrasi PRB ke dalam kurikulum juga ditempuh melalui kegiatan keagamaan, baik individual maupun kolektif. Di madrasah tersebut, kurikulum PAI yang relevan dengan PRB ada tiga mata pelajaran, yaitu:

a. Al-Qur'an Hadis

Materi al-Qur'an Hadis terintegrasi bencana gempa bumi diambil dari banyak ayat-ayat Alquran dan redaksi-redaksi hadis, terutama diambil dari

QS. Az-Zalzalah dan al-Qari'ah. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran antara lain adalah, ceramah interaktif, *drill*, tanya jawab interaktif, dan lain-lain. Sebelum melaksanakan pengajaran Al-Qur'an-Hadis terintegrasi bencana, tenaga pengajar menganalisis beberapa yang KD yang bisa dimasuki materi PRB terlebih dahulu, kemudian hal ini diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) al-Qur'an Hadis terintegrasi bencana.

b. Aqidah Akhlak

Materi Aqidah Akhlak lebih ditekankan pada pengajaran sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari, memperbanyak kalimat *thayyibah*, iman pada hari akhir. Metode yang digunakan hampir sama dengan metode kegiatan pembelajaran al-Qur'an-hadis. Kompetensi dasar matapelajaran ini dicapai melalui indikator menjelaskan pengertian optimis, praktek optimis, hikmah berlaku optimis dalam menghadapi bencana, termasuk gempa bumi, dan mengenal cara-cara penyelamatan diri dalam bencana.

c. Fiqh

Mata pelajaran fiqh mengandung banyak materi yang relevan dengan PRB. Hal ini karena porsi kajian fiqh yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia (ibadah sosial) sejatinya jauh lebih besar dibanding dengan hubungan manusia dengan Allah (ibadah *mahdlah*). Materi fiqh yang relevan dengan PRB di antaranya adalah bahwa dalam kehidupan manusia harus senantiasa menjaga kebersihan secara umum baik

diri maupun lingkungan, begitu pun dalam bermuamalah, manusia diharapkan agar selalu menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam mengeksplorasi alam, dan tidak melakukan *isrof* (berlebihan) maupun *tabdzir* (penghamburan). Mata pelajaran Fiqh terintegrasi PRB tidak hanya berhubungan dengan bencana gempa bumi, namun pada persoalan lingkungan yang lebih mendasar, misalnya penggunaan dan pengelolaan air secara optimal.

B. Saran

1. Indonesia sebagai negara yang rawan dengan beragam bencana masih sangat minim dalam menerapkan pengurangan resiko bencana secara umum, baik dalam hal pelestarian lingkungan, pengembangan teknologi, maupun pendidikan siaga bencana. Asumsi ini didasarkan atas perbandingan dengan Jepang sebagai negara yang mempunyai problematika yang sama dalam hal kebencanaan, dimana disana resiko bencana terutama gempa bumi sudah bisa diminimalisir secara maksimal. Untuk itu langkah yang konkrit dan konsisten harus terus diupayakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, maupun masyarakat secara umum.
2. Kebijakan *stakeholder* MIN Jejeran Bantul terkait sekolah siaga bencana yang sudah terlaksana sampai sekarang hendaknya terus dikembangkan dengan kreasi dan inovasi yang lebih baik, mengingat permasalahan ini bukan sekedar kebijakan untuk menunjukkan bahwa madrasah sebagai pendidikan

kesiapsiagaan terhadap bencana. Namun mengingat kebutuhan terhadap kesiapsiagaan terhadap bencana ini sangat besar karena kerentanan bencana yang ada di lingkungan madrasah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jika anak-anak yang hidup di daerah rawan bencana tidak dibekali dengan pendidikan PRB melalui lembaga-lembaga pendidikan secara sistematis dan terstruktur, maka semakin besar resiko bencana yang akan ditimbulkan.

3. Kebijakan yang telah diambil oleh MIN Jejeran Bantul terkait sekolah siaga bencana harus dikembangkan di sekolah-sekolah lain di Indonesia, tentu dengan porsi yang berbeda-beda, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana dan pernah terkena bencana, seperti Aceh, Nias, Yogyakarta, dan Papua.
4. Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan PRB masih memprihatinkan, terutama dalam hal pemberian arahan, fasilitas, maupun legalitas. Misalnya di MIN Jejeran integrasi materi PRB ke dalam matapelajaran sekolah masih dilakukan oleh guru-guru madrasah secara personal. Begitu pun dengan kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan diri, tidak ada instruksi dari pemerintah tentang bagaimana kegiatan ini dilangsungkan mestinya, hingga kegiatan ini tidak terstruktur dengan baik di antara sekolah siaga bencana satu dengan yang lainnya.
5. Penelitian ini masih perlu ditunjang dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Hal ini karena penelitian-penelitian yang *concern* terhadap masalah kebencanaan khususnya PRB di lingkungan sekolah masih sangat minim,

sedangkan kebutuhan akan informasi tersebut masih sangat dibutuhkan. Penelitian lanjutan dimaksud misalnya yang mengkaji tentang bagaimana efektifitas pendidikan PRB di lembaga-lembaga pendidikan dasar, menengah, maupun atas, yang dikelola oleh pemerintah.